



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112 Telepon/Faximile (0532) 21052
www.bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id bappedalitbangkabkobar@gmail.com

NOTA DINAS

Yth : Pj. Bupati Kotawaringin Barat
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Tembusan : -
Tanggal : 28 Januari 2025
Nomor : -
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Rekomendasi Kebijakan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan **Policy Brief “Pengembangan Inovasi untuk Mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat”** sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis daerah. Dokumen ini disusun untuk menjawab tantangan penurunan kemiskinan yang cenderung stagnan dalam dua tahun terakhir, sekaligus sejalan dengan target RPKD 2023–2028.

Policy Brief ini menekankan perlunya **pendekatan inovatif** yang melampaui pola intervensi konvensional, antara lain melalui:

1. **Integrasi data kemiskinan real-time** yang menggabungkan berbagai sumber untuk memastikan ketepatan sasaran program.
2. **Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa** melalui BUMDes, inkubator UMKM, dan kemitraan dengan pasar modern.
3. **Pemanfaatan teknologi tepat guna** untuk memperluas akses air bersih, sanitasi, dan energi terbarukan di wilayah terpencil.
4. **Skema insentif berbasis kinerja desa** untuk memacu inovasi penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal.
5. **Platform partisipasi masyarakat** yang memfasilitasi perencanaan bersama antara pemerintah dan warga.

Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan secara terukur, berkelanjutan, dan inklusif. Mengingat urgensinya, kami memandang perlu adanya arahan langsung Bupati terkait langkah percepatan implementasi inovasi ini di seluruh perangkat daerah terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Kotawaringin Barat,


Prof. Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., MTP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680608 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112 Telepon/Faximile (0532) 21052
www.bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id bappedalitbangkwbkobar@gmail.com

NOTA DINAS

Yth : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Dari : Perencana Ahli Madya Bappedalitbang
Tembusan : -
Tanggal : 22 Januari 2025
Nomor : -
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Rekomendasi Kebijakan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas perencanaan dan pengembangan kebijakan daerah, bersama ini kami sampaikan **Policy Brief “Pengembangan Inovasi untuk Mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat”** sebagai bahan pertimbangan strategis bagi pimpinan dalam perumusan langkah percepatan pencapaian target RPKD 2026–2028.

Policy Brief ini disusun berdasarkan data terkini BPS, Susenas, dan sumber lokal (SETARA dan Data SIPD Bappedalitbang), yang menunjukkan tren kemiskinan di Kobar cenderung stagnan bahkan sedikit meningkat dari 4,64% (2022) menjadi 5,17% (Maret 2024), sementara capaian akses air bersih dan sanitasi hanya naik $\pm 1,1$ poin persentase. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi baru yang inovatif, terintegrasi lintas sektor, dan berbasis data real-time.

Dalam dokumen ini diuraikan analisis masalah dan rekomendasi pengembangan inovasi yang meliputi integrasi data kemiskinan real-time, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, penerapan teknologi tepat guna untuk layanan dasar, skema insentif kinerja desa, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui co-creation program. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan daya tahan sosial-ekonomi masyarakat.

Demikian disampaikan, untuk dapat kiranya menjadi bahan arahan dan pengambilan kebijakan lebih lanjut. Atas perhatian dan arahannya, diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Dian Novita, S.Hut., M.Sc
Perencana Ahli Madya
NIP. 19771108 200312 2 006

Pengembangan Inovasi untuk Mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Dian Novita¹

Abstrak

Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mencatat tingkat kemiskinan sebesar 4,64% (12.770 jiwa) pada 2022. Data terbaru BPS menunjukkan peningkatan menjadi 5,11% pada Maret 2023 dan 5,17% pada Maret 2024, sedangkan data Susenas (Desember 2024) menunjukkan 4,11% (12.108 jiwa). Perbedaan ini mencerminkan variasi metode pengukuran, namun keduanya mengindikasikan bahwa penurunan kemiskinan belum konsisten dan memerlukan strategi inovasi baru.

Indikator lain seperti akses air bersih dan sanitasi layak mengalami peningkatan tipis $\pm 1,1$ pp dalam dua tahun terakhir. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga belum berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, yang mengindikasikan rendahnya kualitas pekerjaan.

Policy brief ini menekankan pentingnya inovasi kebijakan dan program di tingkat perangkat daerah, dengan integrasi data, teknologi tepat guna, pemberdayaan ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mempercepat pencapaian target RPKD 2023–2028 secara berkelanjutan.

Latar Belakang

Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar, kualitas pekerjaan, dan peluang ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin meningkat dari 4,64% pada 2022 menjadi 5,11% pada Maret 2023 dan 5,17% pada Maret 2024. Meskipun terdapat upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program lintas sektor, tren ini menunjukkan bahwa strategi yang telah ada belum sepenuhnya efektif. Selain itu, capaian akses air bersih dan sanitasi layak hanya meningkat $\pm 1,1$ poin persentase dalam dua tahun terakhir, menandakan perlunya percepatan intervensi.

Penyusunan Policy Brief ini dimaksudkan sebagai instrumen analisis kebijakan yang memberikan rekomendasi berbasis data terkini dan teori pembangunan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama dokumen ini adalah menyediakan rujukan strategis bagi pemerintah

daerah, khususnya perangkat daerah terkait, dalam merumuskan dan mengimplementasikan program inovatif yang tepat sasaran. Dengan memadukan data BPS, Susenas, dan sumber lokal seperti aplikasi SETARA, Policy Brief ini diharapkan dapat menjadi panduan yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi Kobar.

Pentingnya inovasi dalam pengentasan kemiskinan terletak pada kemampuannya untuk menjawab persoalan secara kreatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendekatan konvensional sering kali terhambat oleh birokrasi, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kolaborasi lintas sektor. Melalui inovasi, pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem integrasi data real-time, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta memanfaatkan teknologi tepat guna untuk layanan dasar. Dengan demikian, inovasi tidak hanya mempercepat pencapaian target RPKD, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi tantangan kemiskinan di masa depan.

Deskripsi dan Analisis Masalah

¹ Perencana Ahli Madya, Bappedalitbang Kotawaringin Barat

Untuk memahami perkembangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara komprehensif, diperlukan pemaparan indikator utama yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1 berikut menyajikan data terkini tahun 2022 hingga 2024 yang mencakup persentase dan jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran

terbuka, serta capaian akses air bersih dan sanitasi layak. Data ini menjadi dasar analisis untuk menilai efektivitas program yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan inovasi kebijakan.

Tabel 1. Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat (2022–2024)

Indikator	2022	2023*	2024**	Perubahan 2022–2024
Persentase Penduduk Miskin	4,64 %	5,11 %	5,17 %	+0,53 pp
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	12.770	142.170	145.630	+132.860
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,92 %	3,85 %	3,78 %	-0,14 pp
Akses Air Bersih	73,1 %	73,8 %	74,2 %	+1,1 pp
Sanitasi Layak	70,4 %	71,0 %	71,5 %	+1,1 pp

Sumber: BPS Kobar (*Kobar dalam Angka* 2023 & 2024, rilis pers Maret 2023 dan Maret 2024); Susenas & SETARA Bappedalitbang.

Catatan: Jumlah jiwa 2023 & 2024 dalam ribuan orang, berbeda metode dengan estimasi RPKD 2022.

Analisis Data dan Teori

1. Persentase Kemiskinan

Meskipun terdapat perbedaan metode perhitungan antara data RPKD 2022 dan BPS 2023–2024, secara umum terlihat **kecenderungan stagnan hingga sedikit meningkat**. Kondisi ini menandakan **efektivitas program existing belum optimal** dan perlu **penyesuaian strategi**. Kemiskinan cenderung bertahan atau memburuk jika intervensi tidak mengubah struktur penyebabnya (akses, kesempatan, lingkungan sosial). Inovasi dalam kebijakan dan program harus cepat diadopsi lintas sektor agar hasilnya

signifikan, khususnya dalam situasi stagnasi seperti ini.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Lonjakan angka jiwa pada 2023–2024 dalam data BPS disebabkan perbedaan cakupan dan metode penghitungan (BPS menghitung berdasarkan total populasi dan garis kemiskinan nasional). Terlepas dari perbedaan metode, **jumlah penduduk miskin tidak menunjukkan tren penurunan yang konsisten** dalam dua tahun terakhir. *Evidence-Based Policy Making* menggarisbawahi pentingnya validasi data untuk kebijakan tepat sasaran. Perbedaan angka antar sumber menunjukkan perlunya integrasi data.

Perlu adanya **pembaruan sistem targeting dan integrasi data kemiskinan** (DTKS, Susenas, P3KE, SETARA) agar intervensi program tepat sasaran dan tidak memboroskan anggaran.

3. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Penurunan TPT dari 3,92% (2022) menjadi 3,78% (2024) Penurunan TPT tidak berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, menunjukkan masalah *working poor*.

Yang mengindikasikan peluang kerja ada, tetapi belum berdampak langsung pada penurunan kemiskinan. Hal ini menunjukkan **kualitas pekerjaan dan upah** masih rendah (*working poor*).

Menurut Teori Employment-Led Growth – pertumbuhan ekonomi harus disertai penciptaan pekerjaan layak dengan produktivitas tinggi agar berdampak pada kemiskinan. Inovasi kebijakan di sini berarti mendorong program *upskilling* dan *reskilling*, serta kemitraan usaha mikro dengan pasar yang lebih luas.

4. **Akses Air Bersih dan Sanitasi**

Peningkatan akses air bersih (73,1% → 74,2%) dan sanitasi layak (70,4% → 71,5%) hanya naik ±1,1 pp dalam dua tahun. Peningkatan kecil (±1,1 pp) mengindikasikan perlunya teknologi dan skema pembiayaan inovatif.

Kenaikan ini belum signifikan dan masih ada ±25–28% penduduk yang belum memiliki akses layanan dasar tersebut. *Basic Needs Approach* menegaskan layanan dasar sebagai fondasi pengentasan kemiskinan. Inovasi dapat berupa penerapan **teknologi tepat guna** untuk air bersih dan sanitasi di desa terpencil, serta

model pembiayaan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berdasar pada data-data dan permasalahan di atas, pengembangan Inovasi untuk mengentaskan kemiskinan diperlukan, karena:

- Keterbatasan Dampak Program Konvensional. Data menunjukkan program yang ada belum menghasilkan penurunan signifikan. Berdasarkan teori kebijakan publik (Dunn, 2018), kebijakan harus dievaluasi secara berkala dan diperbaiki melalui pendekatan inovatif untuk menutup kesenjangan hasil.
- Perlu Sinergi Lintas Daerah. Teori Whole-of-Government Approach menjelaskan bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi oleh satu perangkat daerah saja. Inovasi kebijakan harus mendorong integrasi program lintas OPD melalui perencanaan bersama dan indikator kinerja terukur.
- Pentingnya Pengambilan Keputusan Berbasis Data. Mengacu pada Evidence-Based Policy Making, data terkini seperti di Tabel 1 harus digunakan untuk memetakan prioritas dan mengukur efektivitas program. Inovasi berupa real-time dashboard kemiskinan dapat mempercepat respon intervensi.
- Penguatan Partisipasi Masyarakat. Menurut Community-Based Development Theory, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan akan meningkatkan keberlanjutan program. Inovasi dapat berupa co-creation platform untuk desain program kemiskinan.

Rekomendasi Pengembangan Inovasi

1. Integrasi Data Kemiskinan Real-Time

Dibuatnya Dashboard berbasis *big data* yang menggabungkan DTKS, Susenas, P3KE, dan SETARA.

Tujuan: Memastikan kebijakan dan program berbasis data yang akurat dan terkini.

Implementasi Aplikatif:

- Gunakan GIS (Geographic Information System) untuk memetakan rumah tangga miskin, lokasi intervensi, dan wilayah rentan.
- Terapkan update data triwulan dengan kolaborasi antara BPS, Dinas Sosial, dan desa/kelurahan.
- Sediakan akses data terpilah untuk OPD terkait, sehingga program bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.

2. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Desa

BUMDes sebagai motor usaha produktif dan inkubasi UMKM keluarga miskin.

Tujuan: Meningkatkan pendapatan keluarga miskin secara berkelanjutan.

Implementasi Aplikatif:

- Mendorong BUMDes mengelola unit usaha berbasis potensi lokal seperti pertanian organik, pengolahan hasil hutan non-kayu, atau ekowisata.
- Membentuk Inkubator UMKM Desa dengan pelatihan produksi, pemasaran digital, dan akses modal.
- Meluncurkan program kemitraan usaha antara UMKM desa dan pasar modern/toko ritel di Kobar.
- Mengembangkan label produk desa yang diakui secara resmi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai jual.

3. Teknologi Tepat Guna untuk Layanan Dasar

Sistem air bersih hemat biaya, sanitasi komunal inovatif, dan energi terbarukan skala kecil.

Tujuan: Memperluas akses air bersih dan sanitasi dengan biaya terjangkau.

Implementasi Aplikatif:

- Gunakan alat penjernih air portable untuk desa terpencil yang belum memiliki jaringan PDAM.
- Terapkan toilet komunal modern yang hemat air dan ramah lingkungan.
- Perluas pemanfaatan sumur bor bertenaga surya untuk daerah tanpa pasokan listrik stabil.
- Terapkan skema CSR perusahaan perkebunan untuk pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

4. Skema Insentif Kinerja Desa

Dana insentif bagi desa yang berhasil menurunkan kemiskinan secara terukur.

Tujuan: Memotivasi desa untuk berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Implementasi Aplikatif:

- Berikan Dana Insentif Desa (DID) berbasis capaian indikator kemiskinan (penurunan $\geq 0,5\%$ per tahun).
- Adakan kompetisi inovasi desa dengan hadiah berupa tambahan anggaran pembangunan.
- Tetapkan indeks inovasi desa sebagai salah satu syarat pencairan bantuan pemerintah daerah.

5. Partisipasi Masyarakat dan Co-Creation Program

Platform perencanaan partisipatif yang menggabungkan aspirasi warga dengan program pemerintah.

Tujuan: Memastikan program sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

Implementasi Aplikatif:

- Bentuk **Forum Penanggulangan Kemiskinan Desa** yang melibatkan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.
- Adakan **Musrenbang Tematik Kemiskinan** untuk merancang program bersama masyarakat.
- Gunakan **aplikasi usulan warga** berbasis Android untuk memudahkan penyampaian aspirasi dan pelaporan kendala program.
- Luncurkan **kampanye literasi keuangan** untuk mendorong pengelolaan keuangan rumah tangga miskin secara berkelanjutan.